



UPAYA MEMBANGUN INDUSTRI NASIONAL DI TENGAH RELAKSASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Eka Budiyaniti*

Abstrak

Pemerintah merespons kebijakan proteksionisme Amerika Serikat dengan menerapkan relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Relaksasi TKDN bertujuan menjaga daya saing industri nasional serta menarik investasi dan teknologi. Relaksasi TKDN membawa peluang dan risiko bagi industri nasional. Tulisan ini mengulas upaya yang dilakukan untuk membangun industri nasional di tengah relaksasi TKDN. Relaksasi TKDN membuka peluang transfer teknologi, memperluas ekosistem digital, memperkuat kerja sama internasional, dan peningkatan daya saing. Namun, kebijakan relaksasi ini berisiko meningkatkan ketergantungan produk dan komponen impor serta menurunkan insentif bagi pengembangan riset dan inovasi dalam negeri, yang dalam jangka panjang dapat mengancam keberlanjutan industri nasional. Pemberian insentif, regulasi yang mendukung, investasi infrastruktur, serta kemitraan strategis menjadi upaya konkret dalam membangun industri nasional di tengah relaksasi TKDN. DPR RI, khususnya Komisi VII, perlu melindungi industri nasional agar tetap kompetitif. Selain itu, pengawasan dan evaluasi secara berkala atas relaksasi TKDN juga penting untuk mengukur risiko jangka panjang bagi industri nasional.

Pendahuluan

Pada awal April 2025, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan proteksionisme berupa tarif resiprokal sebesar 32% terhadap produk asal Indonesia. Langkah ini diambil untuk mendukung produksi dalam negeri AS dan menyeimbangkan kebijakan tarif dengan negara-negara yang memberlakukan bea masuk tinggi terhadap produk AS. Kebijakan tersebut memicu kekhawatiran, terutama terkait dampaknya terhadap sektor industri dan tenaga kerja. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyatakan bahwa tarif dasar 10% dan tarif resiprokal hingga 32% dapat berujung pada peningkatan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Oleh karena itu, Kadin menyarankan pemerintah mempercepat revisi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai langkah strategis (Sari, 2025).

Relaksasi TKDN kemudian muncul sebagai bagian dari respons terhadap tekanan dagang dari AS, yang menjadikan Indonesia salah satu target kebijakan proteksionisme (Nurdifa, 2025b). Presiden Prabowo Subianto menekankan perlunya fleksibilitas dalam aturan TKDN

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: eka.budiyaniti@dpr.go.id

agar industri dalam negeri mampu beradaptasi dan tetap kompetitif di pasar global (Nurdifa, 2025a). Pemerintah pun mulai mengkaji ulang regulasi TKDN, khususnya untuk sektor *information and communication technologies* (ICT), menyusul permintaan dari perusahaan-perusahaan besar asal AS seperti Apple, Oracle, dan Microsoft.

Sebagai respons terhadap tekanan tarif impor tinggi dari AS, relaksasi TKDN membawa peluang dan risiko bagi industri nasional Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengulas upaya apa saja yang dilakukan untuk membangun industri nasional di tengah relaksasi TKDN.

Relaksasi TKDN sebagai Respons atas Kebijakan Kenaikan Tarif Impor AS

Kebijakan TKDN disusun sebagai upaya strategis untuk mendorong pemanfaatan produk dan sumber daya lokal di berbagai sektor industri di Indonesia. TKDN mencakup beberapa komponen utama, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan proses produksi yang dilakukan di dalam negeri. Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan penguatan kapasitas industri nasional, penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, serta pengurangan ketergantungan terhadap produk dan bahan baku impor.

Namun, baru-baru ini muncul isu relaksasi TKDN sebagai langkah strategis Pemerintah Indonesia dalam merespons kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan oleh AS pada produk asal Indonesia. Pemerintah Indonesia mempertimbangkan relaksasi aturan TKDN sebagai bagian dari strategi negosiasi dagang, guna menjaga hubungan ekonomi bilateral sekaligus menarik kembali minat investasi dari perusahaan teknologi besar asal AS, seperti Apple, Oracle, dan Microsoft.

Dalam konteks ini, relaksasi kebijakan TKDN bertujuan untuk menarik investasi dan mendorong transfer teknologi dari perusahaan multinasional. Selain itu, kebijakan ini memungkinkan adaptasi regulasi di sektor ICT yang sangat dinamis dan berkembang pesat, serta menunjukkan fleksibilitas Indonesia dalam merespons perubahan global sekaligus mempertahankan posisinya dalam rantai pasok global. Presiden Prabowo Subianto juga menekankan bahwa aturan TKDN perlu lebih fleksibel dan realistis agar industri nasional tetap kompetitif dan tidak kehilangan peluang strategis dalam perdagangan global (Nurdifa, 2025a). Pemerintah harus memastikan bahwa pelaku industri domestik maupun asing, memiliki cukup ruang untuk berkembang dan berinovasi tanpa terhambat oleh regulasi yang kaku. Namun, relaksasi ini dilakukan secara selektif dan terbatas pada sektor-sektor tertentu yang ekosistem industrinya belum berkembang optimal.

Peluang dan Risiko Relaksasi TKDN

Relaksasi TKDN sebagai respons atas tarif impor tinggi AS membawa peluang dan risiko bagi industri Indonesia. Di satu sisi, kebijakan ini dapat mendorong kerja sama dengan perusahaan teknologi global seperti Apple, Oracle, dan Microsoft, yang sebelumnya terhambat oleh syarat kandungan lokal. Hal ini berpotensi membuka jalan bagi transfer

teknologi, pelatihan, kerja sama riset, pusat penelitian dan pengembangan (R&D) di dalam negeri.

Hadirnya perusahaan teknologi global dalam regulasi yang lebih terbuka dapat memperkuat ekosistem digital Indonesia. Selain menciptakan lapangan kerja, mereka cenderung berkolaborasi dengan institusi lokal dalam pelatihan dan pengembangan layanan digital. Kolaborasi ini mendorong transfer pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta mempercepat adopsi teknologi canggih di berbagai sektor (Bhaskoro, 2021; Aripuro et al., 2024). Selain itu, perusahaan teknologi global sering kali membawa praktik terbaik dan standar internasional yang dapat membantu meningkatkan kualitas layanan digital di Indonesia (Widia, 2025; Muslim et al., 2024). Hal ini juga mendukung pengembangan infrastruktur digital yang lebih kuat dan inklusif, yang esensial untuk pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan (Rifazka, 2025).

Kelonggaran kewajiban penggunaan komponen lokal memberikan fleksibilitas bagi industri untuk menggunakan komponen impor yang lebih unggul dalam kualitas, teknologi, dan efisiensi biaya. Ini penting saat komponen dalam negeri belum memenuhi standar atau skala produksi yang kompetitif. Dalam jangka pendek hingga menengah, kebijakan ini bisa meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik maupun ekspor.

Namun, di balik peluang tersebut, relaksasi TKDN juga membawa sejumlah risiko yang tidak bisa diabaikan. Salah satu kekhawatiran utama adalah meningkatnya ketergantungan pada produk dan komponen impor. Heru Sutadi dari ICT Institute menilai kondisi ini berbahaya jika terjadi gangguan rantai pasok global atau dinamika geopolitik. Saat ini, sekitar 80% komponen industri elektronik Indonesia masih impor. Karena itu, relaksasi perlu disertai strategi untuk memperkuat produksi lokal dan mendorong inovasi teknologi (Hakim, 2025).

Risiko lainnya adalah menurunnya insentif bagi pengembangan riset dan inovasi dalam negeri. Peluang kerja di sektor manufaktur dan ICT berisiko menurun jika Indonesia hanya menjadi pasar konsumsi tanpa didukung kemampuan produksi yang kuat. Dalam jangka panjang, relaksasi TKDN bisa berdampak pada menurunnya keberlanjutan industri dalam negeri.

Upaya Membangun Industri Nasional di Tengah Relaksasi TKDN

Kebijakan relaksasi TKDN harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, yang menyatakan bahwa pemerintah perlu memberi ruang tumbuh yang sehat dan berkelanjutan bagi industri dalam negeri serta menjaga keseimbangan antara keterbukaan perdagangan dan perlindungan industri lokal (Fauzan, 2025).

Ada beberapa upaya konkret yang bisa dilakukan pemerintah untuk membangun industri nasional di tengah relaksasi TKDN. *Pertama*, pemberian insentif. Pemerintah dapat mendukung industri dalam negeri dengan memberikan insentif seperti pengurangan pajak untuk investasi R&D, subsidi untuk biaya energi dan bahan baku, kredit usaha dengan bunga rendah, program pelatihan tenaga kerja, serta kemitraan publik-swasta untuk proyek infrastruktur. Kombinasi insentif ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri lokal.

Kedua, regulasi yang mendukung. Regulasi yang mendukung industri dalam negeri mencakup peta jalan perwilayahan industri, standar kawasan industri, pengecualian lokasi industri, dan rencana pengelolaan lingkungan hidup. Regulasi ini membantu menciptakan lingkungan yang kondusif dan berkelanjutan bagi pertumbuhan industri lokal.

Ketiga, investasi infrastruktur. Investasi infrastruktur adalah kunci pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur tepat dan mendukung dapat meningkatkan daya saing, menarik investasi asing, dan menciptakan lapangan kerja.

Keempat, kemitraan strategis. Kemitraan antara perusahaan lokal dan asing untuk transfer teknologi dan pengetahuan dapat mempercepat inovasi dan meningkatkan daya saing. Perusahaan lokal mendapatkan akses ke teknologi canggih dan praktik terbaik, serta pelatihan bagi tenaga kerja. Kemitraan ini juga membuka peluang pasar baru, memperkuat industri lokal, dan memberikan dampak positif pada perekonomian nasional. Melalui upaya tersebut, relaksasi TKDN tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar menuju pembangunan industri nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

Penutup

Relaksasi TKDN yang diterapkan oleh Indonesia merupakan langkah pragmatis untuk menghadapi tekanan dari kebijakan proteksionisme AS. Keberlanjutan kebijakan relaksasi TKDN harus diimbangi dengan upaya untuk memperkuat sektor industri dalam negeri, terutama dalam pengembangan kapasitas produksi lokal dan pengurangan ketergantungan pada impor. Sebagai negara dengan potensi besar dalam sektor manufaktur, pemerintah perlu memastikan bahwa relaksasi TKDN memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional.

DPR RI khususnya Komisi VII perlu mendorong perlindungan terhadap pelaku industri komponen lokal yang selama ini bertahan berkat adanya regulasi TKDN. Pemberian insentif, regulasi yang mendukung, investasi infrastruktur, serta kemitraan strategis menjadi upaya konkret yang dapat ditawarkan dalam rangka membangun industri nasional yang kompetitif di tengah kemungkinan membanjirnya produk impor. Di sisi lain, penguatan sistem pengawasan juga mutlak diperlukan. Komisi VII DPR RI perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai implementasi relaksasi TKDN dan dampaknya terhadap struktur industri nasional.

Referensi

- Ariputro, A. B., Syahtaria, M. I., Trismadi, T., Suwarno, P., Widodo, P., & Purwanto, D. A. (2024). Collaboration and technology transfer in the defense industry as drivers of innovation and global security enhancement. *Deleted Journal*, 1(3), 12. <https://doi.org/10.47134/pslse.v1i3.247>.
- Bhaskoro, A. T. (2021, May 24). Mendigitalisasi UMKM Indonesia lewat kolaborasi perusahaan teknologi global dan lokal. *DailySocial*. <https://cms.dailysocial.id/post/mendigitalisasi-umkm-indonesia-lewat-kolaborasi-perusahaan-teknologi-global-dan-lokal/>
- Fauzan, A. M. (2025, April 14). Komisi VII minta relaksasi kebijakan ekonomi gunakan prinsip hati-hati. *antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/4770821/komisi-vii-minta-relaksasi-kebijakan-ekonomi-gunakan-prinsip-hatihatihati>.
- Hakim, L. N. (2025, April 9). Prabowo ancang-ancang longgarkan TKDN, angin segar industri atau bumerang?. *bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250409/257/1867715/prabowo-ancang-ancang-longgarkan-tkdn-angin-segar-industri-atau-bumerang/2>.
- Muslim, Tarigan, T. A. N. B., Mangkuanom, H. H., Pratama, A., & Aulia, M. (2024). Transformasi digital: Dampak dan tantangan teknologi informasi di era modern. *Jurnal Kreasi Rakyat*, 2(1), 26–43.
- Nurdifa, A. R. (2025a, April 8). Prabowo minta aturan TKDN diubah: realistis aja, tak usah dipaksakan. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250408/257/1867553/prabowo-minta-aturan-tkdn-diubah-realistic-aja-tak-usah-dipaksakan>.
- Nurdifa, A. R. (2025b, April 9). TKDN & impor dilonggarkan, ini kata Wamenperin soal nasib industri lokal. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250409/257/1867800/tkdn-impor-dilonggarkan-ini-kata-wamenperin-soal-nasib-industri-lokal>.
- Rifazka, A. (2025, April 14). Strategi digital Indonesia: Antara ekonomi digital, infrastruktur publik, dan integrasi global. *Digital Transformation Indonesia*. <https://digitaltransformation.co.id/strategi-digital-indonesia-antara-ekonomi-digital-infrastruktur-publik-dan-integrasi-global/>.
- Sari, F. L. (2025, April 7). Waswas ekonomi RI terpukul akibat tarif Trump, Kadin beri 5 saran ke pemerintah. *Katadata.co.id*. <https://katadata.co.id/berita/industri/67f3ae571fd6d/waswas-ekonomi-ri-terpukul-akibat-tarif-trump-kadin-beri-5-saran-ke-pemerintah>.
- Widia, S. (2025, April 15). Kolaborasi Lintasarta dan NVIDIA bangun solusi AI lokal yang komprehensif di Indonesia. *youngster.id*. <https://youngster.id/headline/kolaborasi-lintasarta-dan-nvidia-bangun-solusi-ai-lokal-yang-komprehensif-di-indonesia/>.

